

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera

Amelia Omily^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: ameliaomily03@gmail.com

Tanggal Masuk:

22 April 2025

Tanggal Revisi:

20 Juli 2025

Tanggal Diterima:

12 Juni 2026

Keywords: *Internet Financial Reporting; Size of Local Government; Regional Wealth; Regional Shopping.*

How to cite (APA 6th style)

Omily, A., & Arza, F. I. (2026). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Internet Financial Reporting: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (2), 872-885.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i2.2785>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This research aims to determine the influence of regional government size, regional wealth and regional spending on internet financial reporting. The population in this research are districts/cities on the island of Sumatera for the 2023 fiscal year using SPSS 24. This type of research uses a quantitative approach to test the relationship between the dependent variable and the independent variable. This research uses secondary data with a sample of 61 samples taken using the Slovin formula. Data analysis in this research uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The results of this research show that regional wealth has a significant positive effect on internet financial reporting, while government size and regional spending do not have a significant effect on internet financial reporting.

PENDAHULUAN

Berkembangnya informasi dan komunikasi begitu maju dan sangat pesat, sehingga diharapkan lembaga pemerintah daerah mampu merilis laporan keuangannya lewat internet. Ketersediaan dan transparansi informasi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan menyesuaikan aturan tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008. Secara implisit diyakini bahwa dengan disahkannya Undang-Undang ini, pemerintah akan lebih mengutamakan pelayanan publik yang mudah diakses, efisien, dan mudah dipahami, serta penyampaian informasi publik secara lebih jujur dan bertanggung jawab. Berkembangnya informasi dan komunikasi begitu maju dan sangat pesat, sehingga diharapkan lembaga pemerintah daerah mampu merilis laporan keuangannya lewat

internet. Ketersediaan dan transparansi informasi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan menyesuaikan aturan tentang keterbukaan informasi publik sebagaimana termuat dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2008. Secara implisit diyakini bahwa dengan disahkannya Undang-Undang ini, pemerintah akan lebih mengutamakan pelayanan publik yang mudah diakses, efisien, dan mudah dipahami, serta penyampaian informasi publik secara lebih jujur dan bertanggung jawab.

Menurut (Trisnawati & Achmad, 2014), terdapat beberapa pemda di Indonesia menolak untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan pemda secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan perbedaan informasi dan keuangan antara pemerintah daerah. Pada tahun 2012, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.85/179/SJ guna menunjang transparansi pengelolaan anggaran daerah melalui laporan keuangan di internet. Menurut instruksi tersebut, pemda harus memposting 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah di website resmi pemda. Tetapi, sebuah survey yang dilaksanakan pada September 2013 oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran memperlihatkan masih banyak yang masih enggan dalam memposting pengelolaan anggaran mereka secara online di situs resmi mereka. Selain itu, paparan lain diungkap (Agustin & Arza, 2020) yang melakukan penelitian pada pemda Sumatera Barat tentang publikasi pengelolaan anggaran yang dipublikasikan di *website* mereka. Studi tersebut memperlihatkan masih terdapat pemerintah daerah belum transparan dalam pengelolaan anggaran.

Terdapat sinyal bahwa *Internet Financial Reporting* (IFR) belum berjalan dengan baik. Studi yang dilakukan (Agustin & Arza, 2020) menemukan bahwa perbedaan antara transparansi publik dan akuntabilitas sehubungan dengan manajemen laba pengelolaan keuangan daerah. Dalam 7 tahun terakhir (2012-2019), transparansi publik telah meningkat yang mana semua pemda di daerah Sumatera Barat mengungkapkan opini WTP dari BPK atas LKPD melalui *website* resmi dan media massa. Namun, hampir 50% dari 19 pemerintah kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat hanya bersedia memberikan beberapa dokumen sehubungan dengan pengelolaan anggaran. (hanya 5 hingga 7 dokumen dari total 12 dokumen). Selain itu penelitian yang dilakukan (Masra & Sari, 2020) meneliti terkait pendapatan perkapita, belanja daerah, ukuran legislatif memberi pengaruh terhadap IFR dalam praktik pelaporan keuangan yang ada di situs *website* pemda. Dari penelitian yang dilakukan (Masra & Sari, 2020) memiliki referensi jurnal dari (Juniantika & Hapsari, 2020) yang meneliti tentang pengaruh secara simultan dari tingkat kekayaan daerah, opini audit dan tingkat utang pemerintah daerah terhadap Internet Financial Reporting sebesar 9,81%.

Menurut (Masra & Sari, 2020) tingkat akuntabilitas publik sudah mengalami peningkatan selama tujuh tahun terakhir (2012-2019), yang mana semua pemda mempublikasikan pada *website* resmi yang dimiliki dan dapat diakses. Namun perilaku tersebut tidak terjadi transparansi publik pada beberapa daerah di pulau Sumatera, dimana terdapat beberapa Provinsi yang masih enggan mengungkapkan informasi tentang pengelolaan anggaran daerah. Faktor dari kantor pemda di daerah yang kecil yang kemungkinan penggunaan internet kurang dimaksimalkan dengan baik, selain itu kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam melaksanakan transparansi terkait mempublikasikan laporan keuangan kepada publik.

Penelitian ini mengacu pada studi yang dipaparkan (Masra & Sari, 2020). Hal yang berbeda dari studi ini dengan studi sebelumnya yaitu sampel penelitian ini memanfaatkan pemerintah Kota/Kabupaten di Pulau Sumatera. Sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian hanya di pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera

Barat. Selain itu, Studi IFR di Pulau Sumatera sangat jarang dilakukan, untuk itu peneliti tertarik dengan penelitian di Pulau Sumatera agar dapat mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting*.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut teori ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun negara dan memunculkan sinyal positif untuk masyarakat luas. Ralisasinya yakni lewat cara memberikan laporan keuangan yang tepat dan akurat informasi kinerja pemerintahan yang jelas, peningkatan pelayanan publik dan pengemasan prestasi dan kinerja keuangan yang menarik dan juga bisa dipahami secara mudah bagi pengguna laporan (Hilmi & Martani, 2012). Menurut kerangka teori sinyal, asimetri informasi dari pemerintah daerah dan pihak luar terutama masyarakat, menyebabkan dorongan dalam membagikan informasi. Internet menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya (Sofyani & Dwirama, 2020). Penerapan IFR bertujuan agar masyarakat dapat selalu mengawasi, mendukung dan mengevaluasi pemerintah yang sedang berjalan, dengan begitu kinerja pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar (Melati & Handayani, 2021).

Pemerintah daerah dapat mengirimkan pesan positif kepada masyarakat melalui internet. Pemerintah daerah juga berupaya melaksanakan pelaporan keuangan lewat situs web secara lebih efektif sebagai bukti pemerintah telah memenuhi janjinya kepada masyarakat (Puspita & Martani, 2013). Selain itu masyarakat dapat mengurangi asimetri informasi karena mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Internet Financial Reporting

Laporan keuangan harus transparansi serta akuntabilitas yang dapat efisien apabila informasi yang dimuat dapat diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah perlu dipublikasikan lewat media yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, misalnya surat kabar maupun internet sehingga semua orang dapat melihatnya dengan mudah dan cepat (Wau, 2015). Secara mendasar IFR berarti wujud keharusan pemerintah atas pengelolaan laporan lewat internet yang sudah dilaksanakan (Verawaty, 2017).

Informasi laporan keuangan akan disajikan melalui IFR di *website* resmi pemerintah daerah secara efisien. Laporan keuangan sebaiknya disajikan sesegera mungkin untuk memudahkan pengambilan keputusan. (Rahman et al., 2013). Sarana dimana pemerintah dapat menggunakan internet untuk menyebarkan ataupun membagikan informasi keuangan untuk publik dikenal dengan *Internet Financial Reporting* (Sukmadilaga et al., 2019). Pemanfaatan IFR pada pemerintah daerah mempunyai banyak manfaat. Pertama, pemerintah tidak perlu mencetak laporan keuangan sehingga dapat menghemat biaya. Kedua, pihak yang berkepentingan dapat mengakses laporan keuangan pemerintah dengan mengunjungi *website* pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintahan merupakan sebuah bentuk yang dapat dinilai dalam memperlihatkan besar kecilnya pemerintahan (Hartono, et al., 2014). Selain itu, pengelolaan keuangan pemda yang lebih besar juga sangat kompleks, dengan demikian ketika informasi keuangan yang perlu dilaporkan perlu ditingkatkan agar asimetri informasi bisa berkurang. Kebutuhan pengawasan dan pelaporan pemda yang lebih besar, mengakibatkan biaya yang lebih tinggi untuk pengawasan pelaporan. Laporan keuangan dapat diunggah secara *online* untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan ketika mengelola keuangan.

Melalui internet, pemerintah daerah bisa dengan memberikan informasi keuangan serta memenuhi persyaratan pelaporan dan dapat menghemat pengeluaran. Transparansi dalam pengungkapan keuangan pemerintah daerah dapat membantu menghilangkan kesalahan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan begitu untuk mengurangi kecurigaan masyarakat maka pemerintah daerah harus bisa mengeluarkan atau mempublikasi laporan keuangan melalui *website* pemerintah agar bisa dijangkau masyarakat.

Kekayaan Daerah

Sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah disebut kekayaan daerah. Tingkat kekayaan dan pengelolaan keuangan yang baik adalah dua indikator keberhasilan pemerintah daerah. Kekayaan daerah bisa disebutkan dengan total asset pemda. Aset bisa mewakili besar pemerintahan. Jika asset semakin besar menandakan banyaknya penanaman modal yang dilaksanakan. Untuk itu, besarnya asset menjadi indikasi adanya kekayaan dengan jumlah besar. Rendahnya kekayaan daerah memperlihatkan buruknya kinerja pemerintah, sementara kinerja buruk ini dapat mengurangi pengungkapan laporan keuangan dan lebih suka memberi batasan informasi kepada publik.

Pemerintah dengan kinerja yang baik bisa menjabarkan lebih banyak informasi dan memakai metode pengungkapan yang semakin baik, menyesuaikan teori signaling. Pengungkapan laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah bisa mengungkap hasil kinerja suatu pemda dengan mudah dan efisien, sehingga kemudahan akses IFR yang diberikan di *website* resmi bisa menjadi langkah efektif untuk pemerintah daerah agar tuntutan transparansi dari masyarakat bisa terpenuhi dengan biaya ringan

Belanja Daerah

Segala pengeluaran pemerintah yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan daerah dianggap sebagai belanja daerah, termasuk berupa belanja langsung ataupun tidak langsung. Segala jenis penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kota atau kabupaten didanai lewat belanja daerah (Putri & Setiawan, 2022). Definisi dari belanja daerah yakni segala pengeluaran yang wajib ditanggung pemerintah daerah dan mengakibatkan penurunan jumlah kekayaan (Masra & Sari, 2020).

Menurut (Sholikhah & Priyono, 2022), belanja daerah meliputi belanja modal, belanja transfer, belanja operasional dan belanja tak terduga. Belanja daerah ini dipakai guna beragam sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat lewat pelayanan dasar yang disediakan untuk masyarakat (Azis & Hapsari, 2020). Bila dialokasikan secara baik, belanja daerah sangat penting untuk meraih stabilitas perekonomian dan memajukan pembangunan suatu daerah atau negara (Winangsih & Fathah, 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Ukuran pemerintah yakni suatu nilai yang bisa menyajikan besaran kondisi pemerintah daerah (Hartono, 2014). Sebenarnya, *IFR* berguna dalam menekankan pentingnya memantau pelaporan keuangan melalui *web* pemerintah dan juga meminimalkan biaya. *IFR* juga dapat menolong masyarakat agar mendapatkan informasi dengan lebih mudah (Masra & Sari, 2020). Semakin besar pemerintahan, fungsi dan pelayanan yang akan diberikan semakin banyak. Demikian ini memberi dampak pada *web* pemerintah yang semakin canggih dan kompleks (Styles & Tennyson, 2007). Dengan situs *web* pemerintah yang semakin canggih, pemerintah dapat memanfaatkan kemudahan mengakses informasi keuangan. Besarnya ukuran pemerintah daerah lebih cenderung untuk menyampaikan laporan keuangan yang dimiliki karena pemerintahan yang besar mempunyai kekayaan yang lebih besar. Ketika kekayaan dalam pemerintahan besar, menandakan kekayaan tersebut bisa memperoleh pengawasan dari masyarakat, untuk itu menandakan besarnya biaya pengawasan yang ditanggung pemda. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama penelitian bisa dipaparkan sebagai berikut:

H1: Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting*.

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan besar secara sukarela akan membagikan laporan keuangan yang dimiliki di *website* pemda guna menunjukkan kepada masyarakat bahwasannya mereka sudah menjalankan pekerjaan secara baik. Tapi sebaliknya ketika kekayaan pemda tergolong kecil, maka mereka tidak mempublikasikan laporan keuangannya dikarenakan takut mendapatkan kritikan dari masyarakat dan mendapatkan citra yang buruk (Melati & Handayani, 2021). Diantara sumber daya yang membantu pemerintah dalam menjalankan operasionalnya yakni kekayaan daerah. Tingkat kekayaan dan pengelolaan keuangan yang baik adalah dua indikator keberhasilan pemerintah daerah. Kekayaan daerah bisa diungkap memakai total asset pemda. Besaran sebuah pemerintahan bisa tampak dari total assetnya. Ketika asset semakin besar menandakan banyaknya modal yang ditanam. Oleh sebab itu, aset yang besar juga menunjukkan tingkat kekayaan yang besar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua penelitian dapat dipaparkan yakni :

H2: Kekayaan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting*.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Belanja daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang dianggap mengurangi nilai kekayaan (Masra & Sari, 2020). Belanja daerah yang tinggi memberi dampak pada anggaran daerah, yang semestinya menunjukkan apakah pemda memakai anggaran daerah dengan baik untuk membantu masyarakat. Dengan demikian pemda bisa semakin bersemangat dalam mengungkap laporan keuangan yang dimiliki kepada masyarakat bahkan lewat situs *web* pemerintahan (Alhajriana, 2017). Belanja modal, belanja operasi, belanja transfer serta belanja tak terduga termasuk kedalam belanja daerah (Sholikhah & Priyono, 2022). Penggunaan belanja daerah bisa sebagai penyedia berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat lewat pelayanan dasar yang disediakan untuk masyarakat (Azis & Hapsari, 2020). Ketika disalurkan secara baik, belanja daerah mempunyai peranan penting untuk meraih stabilitas perekonomian dan

memajukan pertumbuhan suatu daerah atau negara. Berdasarkan paparan yang ada, hipotesis ketiga penelitian bisa dimunculkan yakni:

H3: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 154 Kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera. Penentuan jumlah sampel diukur dengan rumus solvin dengan total 61 sampel yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera tahun anggaran 2023 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta data jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Dokumen yang dipakai yakni dokumen sekunder yakni berupa laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh dari berbagai faktor dalam pengungkapan dan mempublikasi laporan keuangan melalui *website* yang digunakan pada pmda di Pulau Sumatera.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Internet Financial Reporting

Pemanfaatan *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah mempunyai banyak manfaat. Pertama, pemerintah tidak perlu mencetak laporan keuangan sehingga dapat menghemat biaya. Kedua, pihak yang berkepentingan dapat mengakses laporan keuangan pemerintah dengan mengunjungi *website* pemerintah daerah.

Pengukuran indeks IFR dilaksanakan lewat cara memeriksa isi *web* pemerintah daerah diberikan skor, kemudian skor tersebut dijumlahkan untuk setiap komponen. Menurut (Handayani, 2018) jika pemerintah memanfaatkan teknologi dengan baik dan menyajikan seluruh data keuangan di situs pmda sesuai dengan indeks *IFR*, maka *IFR* dinilai mempunyai kualitas yang tinggi. Jika seluruh indeks *IFR* terpenuhi dengan total skor maksimal 103, maka informasi tersebut dianggap berkualitas tinggi.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintahan dapat dipergunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu pemerintahan. (Hartono, 2014). Pemerintah daerah yang lebih besar dalam konteks ini akan mempunyai pengelolaan keuangan relatif kompleks, untuk itu memerlukan pelaporan data keuangan yang lebih banyak untuk mengurangi asimetri informasi.

Untuk mengukur Ukuran Pemerintah Daerah, proxy yang digunakan yaitu Jumlah Penduduk. Sehubungan dengan studi ini dilaksanakan perhitungan jumlah penduduk. memakai proyeksi dengan acuan sensus penduduk tahun 2023.

Kekayaan Daerah

Sumber daya yang memberi dukungan dengan kegiatan operasi pemerintah daerah yakni kekayaan daerah. Tingkatan kekayaan dan pengelolaan keuangan yang baik adalah dua indikator keberhasilan pemerintah daerah. Total asset pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengukur kekayaan daerah. Besarnya sebuah pemerintahan bisa tampak dari asetnya. Asset yang semakin besar menandakan banyaknya modal yang ditanam. Merujuk paparan Sofyani dan Dwirama (2019) untuk

mengukur kekayaan daerah suatu pemerintahan daerah bisa menggunakan perumusan yakni:

$$\text{Kekayaan Daerah} = \text{Ln (Total Aset Pemda)}$$

Belanja Daerah

Setiap pengeluaran pemerintah yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan bersih daerah disebut sebagai belanja daerah, baik berupa belanja langsung ataupun tidak langsung. Segala jenis penyelenggaraan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten didanai lewat belanja daerah terkait (Putri & Setiawan, 2022)

Menurut (Masra & Sari, 2020) pengukuran untuk belanja daerah memakai perumusan yakni:

$$\text{Belanja daerah} = \text{Ln total belanja daerah.}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif

	Ukuran Pemda	Kekayaan Daerah	Belanja Daerah	IFR
N Valid	51	51	51	51
Missing	0	0	0	0
Mean	393,572.22	28.2453	27.8865	99.9608
Median	236,727.00	28.5100	27.8000	100.0000
Mode	3,508	28.46	27.67	103.00
Std. Deviation	458,019.228	1.98604	.80080	3.04605
Minimum	3,508	21.03	23.98	95.00
Maximum	2,474,166	31.24	29.47	105.00

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 1 diatas, variabel idependen pertama dalam penelitian ini yaitu ukuran pemda memiliki nilai mean sebesar 393,573,22, nilai median sebesar 236,727,00, nilai mode sebesar 3,508 nilai standar devisiasi sebesar 458,010,228, Nilai Minimum sebesar 3,508 dan nilai maksimum sebesar 2,474,166. Nilai mean lebih kecil dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi tinggi sehingga penyebaran nilainya tidak merata. Variabel dependen kedua, kekayaan daerah memiliki nilai mean sebesar 28,2453, nilai median sebesar 28,5100, nilai Mode sebesar 28,46 nilai standar devisiasi sebesar 1,98604, nilai minimum sebesar 21,03 dan nilai maksimum sebesar 31,24. Nilai mean lebih besar dari pada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata. Variabel idependen ketiga, belanja daerah memiliki nilai mean sebesar 27,8865, nilai median sebesar 27,8000, nilai mode sebesar 27,67 nilai standar devisiasi sebesar 0,80080, nilai minimum sebesar 23,98 dan nilai maksimum sebesar 29,47. Nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata. Untuk variabel dependen yakni IFR, memiliki nilai mean sebesar 99,9608, nilai median sebesar 100,0000, nilai mode sebesar 103,00 nilai standar devisiasi sebesar 3,04605, nilai

minimum sebesar 95,00 dan nilai maksimum sebesar 105,00. nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	sig
1 (Constant)	108.787	16.489		6.597	.000
Ukuran Pemda	-1.653E-6	.000	-.249	-1.606	.115
Kekayaan Daerah	.474	.210	.309	2.258	.029
Belanja Daerah	-.773	.586	-.203	-1.321	.193

Sumber; Data diolah dengan SPSS

Hasil dari uji regresi berganda pada tabel terlihat bahwasanya konstanta bernilai 108,787 yang menjelaskan bahwa tanpa pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas yang terdiri atas ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah, makna nilai dari *Internet Financial Reporting* (IFR) sebagai variabel dependen adalah 108,787. Nilai koefisien dari variabel ukuran pendapatan daerah bernilai negative yakni sebesar -1.653E-6 maka dapat dipastikan bahwa jika variabel Ukuran Pemda meningkat maka variabel IFR akan mengalami penurunan sebesar 1,654E-6, begitu juga sebaliknya. Nilai Koefisien regresi variabel Kekayaan Daerah bernilai positif sebesar 0,474 maka dapat dipastikan bahwa jika variabel Kekayaan Daerah meningkat maka variabel IFR akan mengalami peningkatan juga sebesar 0,474, begitu juga sebaliknya. Nilai Koefisien regresi variabel Belanja Daerah bernilai negative sebesar -0,773 maka dapat dipastikan bahwa jika variabel Belanja Daerah meningkat maka variabel IFR akan mengalami penurunan sebesar 0,773, begitu juga sebaliknya

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Sampel	Signifikansi	Simpulan
51	0.200	Bebas Normalitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikan *Asymp Sig (2-tailed)* yang menggambarkan nilai kolmogrov-smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan pengambilan Keputusan uji normalistas apabila nilai signifikan uji kolmogrov-smirnov lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya distribusi data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Ukuran Pemda	0,725	1,379	Bebas Multikolineritas
Kekayaan Daerah	0,926	1,079	Bebas Multikolineritas
Belanja Daerah	0,732	1,365	Bebas Multikolineritas

Sumber; Data diolah dengan SPSS

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel ukuran pemda sebesar 0,725, artinya lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF sebesar 1,379 artinya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. Nilai *tolerance* dari variabel kekayaan daerah yakni 0,926, artinya lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF sebesar 1,079 yang berarti lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance* dari variabel yang terakhir yakni Belanja daerah sebesar 0,732, artinya lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF sebesar 1,365 yang berarti lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Ukuran Pemda	0,119	Tidak Terjadi Heterokseditas
Kekayaan Daerah	0,136	Tidak Terjadi Heterokseditas
Belanja Daerah	0,825	Tidak Terjadi Heterokseditas

Sumber: Data diolah dengan SPSS

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel ukuran pemda yaitu sebesar 0,119 lebih besar dari 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel kekayaan daerah nilai signifikannya sebesar 0,136

lebih besar dari 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel yang terakhir yaitu kekayaan daerah yang memiliki nilai signifikannya yaitu sebesar 0,82 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6
Hasil Uji F

F_{hitung}	Signifikansi	Kesimpulan
3,533	0,022	Diterima

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 3,533. Sedangkan pada F tabel di peroleh sebesar 2, 80. Signifikansi untuk variabel ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah secara simultan terhadap IFR adalah sebesar 0,022 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 3,533 > F tabel 2,80, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap IFR.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1		.429	.184	.132	2.83802

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Kekayaan Daerah, Ukuran Pemda

b. Dependent Variable: IFR

Sumber : Data Diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7 diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,132 atau 13,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat dijelaskan sebesar 13,2% oleh variabel dependen dalam penelitian ini yakni ukuran pemerintah, kekayaan daerah dan belanja daerah.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 8
Hasil Uji T

	T hitung	Signifikansi
Ukuran Pemda	-1.606	.115
Kekayaan Daerah	2.258	.029
Belanja Daerah	-1.321	.193

Sumber: Data diolah dengan SPSS

- 1) Pada hipotesis pertama dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel ukuran pemerintah daerah sebesar $0,115 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-1,606 < t_{tabel}$ sebesar $1,678$. Hal ini menandakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Nilai koefisien yang negatif menjelaskan arah dari ukuran pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan arah hipotesis. Kesimpulannya, hipotesis pertama berbunyi, “Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR”, ditolak.
- 2) Pada Hipotesis kedua dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel kekayaan daerah sebesar $0,095 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,258 > t_{tabel}$ sebesar $1,678$. Hal ini menandakan kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Nilai koefisien yang positif menandakan kekayaan daerah sesuai dengan arah hipotesis, sehingga mampu membuktikan secara signifikan pengaruh dari kekayaan daerah terhadap IFR. Kesimpulannya, hipotesis kedua yang berbunyi “Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)”, diterima
- 3) Pada hipotesis ketiga dapat dilihat bahwa bahwa nilai signifikansi untuk variabel belanja daerah sebesar $0,193 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-1,321 < t_{tabel}$ $1,678$. Hal ini menandakan tingkat belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Nilai koefisien yang negatif menjelaskan arah dari tingkat belanja daerah yang tidak sesuai dengan arah hipotesis. Kesimpulannya, hipotesis ketiga yang berbunyi “Belanja daerah berpengaruh positif terhadap IFR”, ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2023, ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 7 uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel ukuran pemerintah sebesar $0,115 > 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $-1,606 < t_{tabel}$ sebesar $1,678$ dengan arah negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang diprosikan dengan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pelaksanaan IFR. Faktor penyebabnya bisa dari sikap dan sifat masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan kegiatan pemerintah, dan juga bisa disebabkan oleh pemerintah daerah yang masih enggan untuk melakukan pengungkapan melalui IFR. Sanksi yang tegas belum diatur

apabila pemda tersebut belum melakukan IFR. Seharusnya pemerintah daerah mulai menerapkan IFR dari sekarang agar mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masra & Sari, 2020) yang menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda melalui internet. Asumsi jumlah penduduk yang tinggi lebih memotivasi mengakses laporan keuangan melalui internet merupakan asumsi yang tidak sepenuhnya benar. Fakta tentang ukuran pemerintah yang meningkat adalah fenomena ekonomi yang terpisah dari kinerja pemda.

Pengaruh kekayaan Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2023, ditemukan hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR). Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 7 uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel kekayaan daerah sebesar $0,095 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,258 > t_{tabel}$ sebesar 1,678, dengan arah positif.

Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, apabila terjadi kenaikan atau penurunan kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemda akan menambah jumlah pelaporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Hal tersebut juga mengidentifikasikan bahwa kekayaan daerah yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* pemda.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2023, ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Internet Financial Reporting*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 uji t, yang menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel belanja daerah sebesar $0,193 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-1,321 < t_{tabel}$ 1,678, dengan arah negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2022) dan (Purwanti & Suparman, 2017) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan IFR. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih berfokus untuk memberikan pelayanan yang bersifat langsung yang dapat dirasakan oleh penduduk, dari pada mendanai layanan informasi keuangan.

Pengungkapan IFR yang rendah terjadi karena publikasi keuangan melalui internet masih bersifat sukarela, sehingga tidak semua pemda mengungkapkan laporan keuangannya pada *website* resminya. Hal ini bertentangan dengan teori *Signalling* dimana pemerintah bertanggung jawab untuk membangun sinyal positif untuk masyarakat luas dengan cara memberikan laporan keuangan yang tepat, akurat dan mudah dipahami (Hilmi & Martani, 2012).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap *internet financial reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun anggaran 2023. Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. (2) Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. (3) Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil yang diteliti. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan tahun pengamatan di tahun 2023 saja. Rentang waktu ini kemungkinan tidak cukup untuk mengungkap pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap *internet financial reporting*.
- 2) Jika dilihat dari nilai *Adjusted R Square*, kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 13,2%, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *internet financial reporting*.

Saran

- 1) Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan transparansi kinerja terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar asimetri informasi yang ada pada Masyarakat dapat berkurang. Disamping itu, transparansi mampu mencegah terjadinya Tindakan korupsi atau *fraud*.
- 2) Peneliti dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lainnya seperti opini audit, *leverage*, kompetisi politik dan indeks pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Arza, F. I. (2020). *Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era*. 124(2016), 154–166. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.064>
- Azis, I., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018). *E-Proceeding Of Management*, 7(2), 3262–3269.
- Handayani, E. (2018). Internet Financial Reporting: Studi Komparasi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Efek Malaysia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Juniantika, D. A., & Hapsari, D. W. (2020). What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 3(2), 102–116. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v3i2.17235>

- Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IfR) Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 2(2), 2757–2771. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246>
- Melati, M., & Handayani, D. F. (2021). Influence Of Regional Wealth, Community Welfare, and Quality of Financial Statements on Internet Financial Reporting (Local Government on Sumatera Islan for Fiscal Year 2019). *Simposium Nasional Akuntansi*, 19(2), 79–91. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/27501>
- Purwanti, R. E., & Suparman, L. (2017). *THE DETERMINANTS TRANSPARENCY AND ACCESSIBILITY OF INTERNET FINANCIAL REPORTING*. 378–394.
- Puspita, R., & Martani, D. (2013). Analisa Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putri, W., & Setiawan, M. A. (2022). Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 438–448. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.482>
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiatmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI, September 2013*, 1299–1323.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2020). Determinan Praktik Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 158–168. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.5855>
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management Article information. *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003>
- Sukmadilaga, C., Ritchi, H., Suciati, H., Lestari, T. U., & Ghani, E. K. (2019). Digital financial reporting practices among public listed mining companies in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(2), 1116–1133.
- Verawaty. (2017). *Determinantransparansiinformasikeuangandaerahmelalui E-Governmentpemerintahdaerahdisumateraselatan*. 13(2), 92–107.
- Wau, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah. In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4, Issue 4).
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *ULIL ALBAB : Jurnal IlmiahMultidisiplin*, 2(8), 3299–3309.